

RESISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBANGUNAN WADUK LAMBO DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN KABUPATEN NAGEKEO¹

Jacob Wadu, Primus Lake² dan Claudia Pita³

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat petani, berupaya melaksanakan pembangunan di bidang pengairan melalui penyediaan sarana air baku. Penyediaan air baku ini, antara lain melalui pengembangan sumber air buatan berupa bendungan atau waduk. Waduk merupakan bendungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan maksud untuk menampung air yang nantinya dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Waduk ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat itu sendiri yaitu (1) penyediaan air baku, (2) air irigasi persawahan, (3) budidaya ikan air tawar, dan (4) pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Untuk pembangunan waduk tersebut, membutuhkan tanah sebagai lahan pembangunan waduknya. Akan tetapi, tanah-tanah ini umumnya milik masyarakat, sehingga pemerintah harus melakukan pembebasan.

Pembebasan tanah untuk pembangunan harus dilakukan dengan cara musyawarah yang setara antara pemilik tanah dan pihak pembebas (pemerintah), pengawasan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah

(bupati/walikota) (Hutagalung, 2005:153). Ketentuan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pembangunan waduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini merupakan salah satu program Nawacita Presiden Jokowi dilaksanakan sejumlah daerah di tanah air. Proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tak terkecuali pembangunan waduk, kadangkala menimbulkan reaksi masyarakat dalam bentuk penolakan. Beberapa hasil penelitian tentang penolakan masyarakat dengan kebijakan pembangunan yaitu : (1) kasus pembebasan tanah untuk pembangunan Bendungan Raknamo di Desa Am Abi Oefeto Kabupaten Kupang. Kasus ini terkait dengan ganti untung pembebasan tanah yang memicu perlawanan rakyat dalam bentuk konflik sosial (Ofe : 2017). (2) perlawanan masyarakat tentang rencana pembangunan

¹ Artikel ini merupakan hasil penelitian ketiga Penulis di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo

² Penulis pertama dan kedua adalah Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Undana

³ Penulis ketiga adalah mahasiswa semester IX Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Undana

Bendungan Nipah di Kabupaten Sampang Madura. Kasus ini terkait dengan penolakan masyarakat untuk pembebasan dan pengukuran tanah untuk lahan pembangunan waduk Nipah (Nurhajarini, dkk : 2005). Kasus-kasus di atas, merupakan contoh-contoh prototipe dari masalah ketidaksepahaman antara pemerintah dengan masyarakat mengenai pembebasan lahan bagi pembangunan umumnya dan khusus infrastruktur waduk.

Pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah tak jarang justru menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat akibat hilangnya sumber-sumber pendapatan dan ruang hidup warga. Adanya ketidakpuasan warga inilah yang kemudian menjadi pemicu timbulnya resistensi masyarakat terhadap suatu kebijakan pembangunan.

Demikian pula dengan rencana pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo. Rencana pembangunan ini telah dimulai tahun 2001-2003 dari masa pemerintah Kabupaten Ngada. Rencana pembangunan Waduk lambo tahun 2015 ini merupakan kelanjutan dari rencana pembangunan tahun 2001 yang terhenti, karena penolakan masyarakat pada waktu itu. Rencana pembangunan waduk tahun 2001 tersebut dimaksudkan untuk mendukung pengembangan wilayah di dataran Mbay sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Indonesia.

Luas areal calon genangan air Waduk Lambo waktu itu diperkirakan mencapai 431,92 ha. Pembangunan Waduk Lambo diusulkan kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 23 Juni 2015. Pengusulan pembangunan waduk ini bertujuan untuk (a) memenuhi kebutuhan air baku di sebagian Kecamatan Aesea Selatan dan Perkotaan

Mbay, (b) menyediakan air bagi irigasi pertanian, dan (c) Pembangkit Listrik Tenaga Air.

Akan tetapi, masyarakat Rendubutowe sebagai lokasi rencana pembangunan waduk Lambo menolak pembangunan tersebut di lahan pertanian milik mereka. Masyarakat menilai bahwa dibalik kehendak baik pemerintah, namun akan mengakibatkan (a) adanya memarginalisasi yang dapat mengancam tatanan sosial budaya serta keberlangsungan hidup mereka. (b) sebagai upaya perampasan ruang hidup, karena pembangunan mega proyek infrastruktur waduk ini akan menenggelamkan lahan produktif dan perkampungan mereka. Timbulnya perlawanan masyarakat terkait dengan pembangunan Waduk Lambo karena tanah atau lahan yang digunakan dalam pembangunan bendungan tersebut berstatus tanah ulayat yang kepemilikannya secara komunal oleh 3 suku yang berada di Desa Rendubutowe yaitu Suku Isa, Suku Gaja, dan Suku Redu.

Bentuk-bentuk penolakan masyarakat Adat Lambo terhadap rencana pembangunan Waduk Lambo (a) melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Nagekeo pada tanggal 28 Oktober 2016, (b) menghadang tim survei dari Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk tidak melakukan survei, dan (c) aksi buka dada yang dilakukan oleh ibu-ibu dalam menghadang tim survei. Bentuk perlawanan ini dilakukan secara kolektif oleh masyarakat Desa Rendubutowe. Selain itu masyarakat juga mengirim surat penolakan pembangunan Waduk Lambo kepada Gubernur NTT, Kementerian PU, dan Presiden Republik Indonesia. Tujuannya agar Pemda Nagekeo segera menghentikan pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe.

Meskipun diprotes dan ditolak oleh masyarakat, pemerintah Kabupaten Nagekeo tetap berupaya untuk melanjutkan rencana

pembangunan ini dengan harapan bahwa sikap protes dalam bentuk penolakan tersebut akan berubah melalui negosiasi dan sosialisasi. Harapan pemerintah bisa meredam protes dan penolakan masyarakat melalui negosiasi dan persuasi namun tidak terwujud, terbukti ketika setiap tahapan implementasi rencana pembangunan Waduk Lambo tidak dapat terealisasi karena direspon dengan aksi perlawanan. Usaha penolakan masyarakat terus dilakukan untuk menggagalkan mega proyek ini. Walaupun dalam perjalanannya harus berhadapan dengan tindakan represif-koersif. Namun hal itu membuat perlawanan masyarakat semakin masif, akibatnya mampu membuat mandeknya seluruh tahapan rencana pembangunan Waduk Lambo.

Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan adanya resistensi masyarakat Adat Lambo terhadap pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe Kec. Aesesa Selatan Kab. Nagekeo

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Mengapa terjadinya resistensi masyarakat terhadap pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo ?

TUJUAN PENELITIAN

Uk mendeskripsikan penyebab terjadinya resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe Kec. Aesesa Selatan Kab. Nagekeo.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan sebagai sebuah perubahan yang berencana dari suatu keadaan menuju suatu kondisi yang lebih baik, dalam realitasnya tidak langsung diterima begitu saja oleh masyarakat sasaran (*target group*). Sebab menurut Siagian (1983 ; 72-77) bahwa dalam suatu masyarakat terutama di negara berkembang pada dasarnya terdiri atas tiga golongan besar yaitu : golongan tradisional, golongan modernis dan golongan ambivalents.

Golongan tradisional ini mempunyai kecenderungan menolak setiap yang diintrodusir di dalam masyarakat dan mereka lebih senang untuk mempertahankan status quo di dalam masyarakat tersebut. Golongan modernis merupakan kelompok developmentalis yang mempunyai pendidikan tinggi, mempunyai pandangan luas, berorientasi ke masa depan, memelopori dan memperkenalkan norma-norma sosial yang baru, dan mereka bekerja atas dasar adaptasi dan bukan adopsi. Sedangkan golongan ambivalents merupakan golongan yang sangat berbahaya bagi suatu masyarakat, bagaimanapun tingkat pembangunan dan modernitas yang dicapai. Golongan ini mempunyai jumlah yang lebih besar dari kedua golongan lainnya. Kelompok ini mempunyai ciri-cirinya berorientasi masa sekarang, tidak mau memelopori perubahan di dalam masyarakat, dan mereka mempunyai sifat yang mudah berubah-ubah.

Dalam proses pembangunan akan terjadi pertarungan antara ketiga golongan ini, maka yang menang adalah golongan tradisional yang akan menang, maka golongan ambivalent ini tidak sukar berubah menjadi golongan tradisional yang mempertahankan kedudukan, status, jabatan dan kekayaannya dalam masyarakat.

Kedua golongan ini mempunyai kecenderungan untuk menolak perubahan atau pembangunan karena dianggap upaya untuk mengganggu kedudukan dan status mereka yang sudah mapan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini berfokus pada analisis munculnya resistensi masyarakat Adat Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo dan respon pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat yang menolak pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Pemerintahan, Ketua DPR, Kadis PUPR, Kepala kantor BPN, Camat Aesesa Selatan, Kades Rendubutowe, Ketua dan 4 anggota FPPWL (forum penolakan pembangunan waduk lambo), dan 3 orang masyarakat Desa Rendubutowe. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Wilayah Sengketa Waduk Lambo

Masyarakat adat Rendubutowe terdiri atas 3 (tiga) suku besar yaitu suku Redu, suku *Isa*, dan suku *Gaja*. Setiap suku memiliki *Woe*

(marga) atau biasa disebut *ruh suku*. Suku-suku yang memiliki *Woe* adalah suku *Redu* dengan sebutan *Woe Ebutuza*, *Woe Ebudapa*, *Woe Ebuwedho*, *Woe Nakanato*, *Woe Aupoma Para meze*, *Woe Nanggatengi*, *Woe Dhiri Ke'o*, sedangkan Suku *Isa* terdiri dari *Isa* dan *Dhere*, dan suku *Gaja* terdiri atas *Woe Ana Wata*, *Woe Dala Mere*, *Woe Naka Ghubu*, dan *Woe Tude*. Di dalam *Woe* (marga) ada juga yang disebut dengan *Ulu Manu* (kepala keluarga). Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adat dari berbagai suku-suku ini adalah bertani atau berladang.

Pembangunan Waduk Lambo direncanakan seluas 431,92 ha yang mencakup wilayah Desa Labolewa, Desa Ulupulu dan Desa Rendubutowe. Calon genangan air diperkirakan mencapai 309,428 ha. Wilayah yang direncanakan untuk membangun waduk berada di Desa Rendubutowe khususnya di Dusun Malapoma.

Konflik awal pembangunan waduk Lambo dimulai ketika tim survei melakukan pengukuran di daerah hulu Aesesa sepanjang sungai Lowese pada tahun 2001. Masyarakat setempat yang mengaku tidak mendapatkan informasi terkait rencana pembangunan tersebut, sehingga mereka melakukan aksi penolakan dengan memblokir akses menuju ke titik lokasi pengukuran. Menurut ketua Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPWL), penolakan ini didasarkan atas kekecewaan masyarakat yang tidak memperoleh informasi secara jelas terkait rencana pembangunan waduk tersebut.

Pemerintah Kabupaten Nagda melakukan pemaparan hasil kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang difasilitasi oleh Universitas Nusa Cendana pada tahun 2002. Dalam sosialisasi hasil kajian ini melibatkan 5 orang dari masing-masing desa terdampak. Dalam kegiatan sosialisasi ini,

perwakilan yang hadir tetap menyatakan sikap menolak dan menawarkan alternatif lain yaitu pembangunan *small dam* di 3 (tiga) titik yakni kampung Neta Wulu di desa Rendubutowe, kampung Kelitabu di desa Ulupulu Dan Kampung Tiwu Ndora di desa Labolewa (Helenarius, 2018:46). Akan tetapi lokasi baru yang ditawarkan masyarakat setelah disurvei oleh pemerintah daerah ternyata tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dilakukan proses selanjutnya.

Setelah mengalami penolakan secara masif pada tahun 2002, kemudian Pemerintah Kabupaten Nagekeo kembali mengusulkan rencana pembangunan bendungan Lambo pada tahun 2015 dengan lokasi yang sama dengan sebelumnya. Sebagai tindak lanjutnya Pemerintah Kabupaten Nagekeo melaksanakan pertemuan awal dengan seluruh Camat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama di kantor Bupati Nagekeo pada tanggal 23 Juni 2015. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2016, pemerintah daerah bersama tim melakukan sosialisasi kepada kepala desa dan masyarakat terkait rencana pembangunan di desa Rendubutowe. Sosialisasi ini diwarnai dengan aksi penghadangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat di depan Kantor Desa. Dalam aksinya, kelompok masyarakat adat menuntut Bupati untuk menyampaikan kepada Gubernur dan Presiden untuk tetap tidak melaksanakan pembangunan ini. Kelompok masyarakat adat merasa martabat mereka sebagai masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah di wilayah calon genangan waduk dilecehkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebenarnya telah berulang kali melakukan pendekatan dan sosialisasi dengan masyarakat Desa Rendubutowe namun masyarakat tetap bersikap menolak pembangunan tersebut.

2. Faktor-faktor Penyebab Resistensi Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan Wadu Lambo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi masyarakat adat Rendubutowe dalam pembangunan waduk Lambo tersebut yaitu :

a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat di lokasi rencana pembangunan

Setiap kegiatan pembangunan termasuk pembangunan waduk yang akan dilaksanakan perlu adanya sosialisasi berulang-ulang kepada masyarakat, agar mereka dapat memahami maksud dan tujuan serta manfaat dari pembangunan tersebut. Dalam sosialisasi tersebut perlu dijelaskan kepada masyarakat mengenai hak-hak masyarakat, seperti ganti untung atas lahan milik yang dibebaskan, berbagai tanaman yang di atas lahan tersebut, rumah-rumah masyarakat yang akan digusur, bagaimana dengan masyarakat yang harus direlokasi, tempat-tempat ritual adat, dan kuburan-kuburan nenek moyang mereka.

Kesemuanya ini belum pernah dijelaskan secara baik oleh pemerintah daerah kepada masyarakat tentang hak-haknya, sehingga muncul penolakan terhadap rencana pembangunan waduk tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo kepada masyarakat di desa-desa yang diperkirakan terdampak dari kegiatan pembangunan ini hanya sekali saja. Karena itu pemerintah Desa Rendubutowe dan masyarakatnya sebagai wilayah calon lokasi pembangunan merasa tidak pernah mendapat informasi yang lengkap dan detail tentang rencana pembangunan waduk ini,

kecuali hanya surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan pengukuran lahan untuk pembangunan waduk Lambo oleh pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jene Sakeke Wea selaku Camat Aesesa Selatan 18 Agustus 2020 sebagai berikut:

Pokok persoalan paling mendasar dalam pembangunan adalah soal pendekatan dan komunikasi yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah. Terkait dengan rencana pembangunan Waduk Lambo itu hanya berpusat pada sosialisasi dalam forum formal dan cenderung kurang menghasilkan komunikasi yang efektif. Jika pemerintah dari awal rencana pembangunan menerapkan pendekatan budaya atau mempertimbangkan unsur lokal, mungkin permasalahan ini tidak akan berakhir dengan konflik yang berkepanjangan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Ibu Mariana Dua selaku Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagekeo menunjukkan bahwa :

Pemerintah mau melibatkan masyarakat hanya persoalan utama yang tadi, yaitu faktor informasi yang sudah lebih dulu yang masuk kepada masyarakat yang kesannya bahwa masyarakat itu banyak ruginya daripadanya manfaatnya, sehingga telah terjadi mis komunikasi. Pemerintah berusaha membangun komunikasi tetapi masyarakat tolak, membangun komunikasi saja masyarakat tolak, itu kan lucu dan bagaimana mau melibatkan mereka. Dan kalau komunikasi bisa dibangun dengan baik pasti pemerintah akan melibatkan masyarakat. (Wawancara, Ibu Mariana Dua tanggal 15 Agustus 2020).

Dengan demikian, maka adanya resistensi masyarakat adat terhadap pembanguna Waduk Lambo, karena kurangnya informasi yang diberikan pemerintah daerah Nagekeo kepada masyarakat yang diperkirakan terkena dampak pembangunan tersebut. Hal-hal yang perlu dijelaskan pemerintah daerah kepada masyarakat adat Rendubutowe adalah yang berkaitan dengan hak-hak mereka seperti ganti untung atas lahan mereka, bagaimana masyarakat yang terdampak direlokasi, tempat-tempat ritual adat dan kuburan-kuburan nenek moyang yang harus dipindahkan, tetapi semuanya ini tidak pernah dijelaskan secara baik oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal-hal ini belum pernah dijelaskan dengan lengkap dan detail oleh pemerintah Daerah Nagekeo kepada masyarakat Desa Rendubutowe sebagai lokasi rencana pembangunan waduk tersebut.

b. Pendekatan kepada masyarakat yang kurang tepat

Sosialisasi saja ternyata tidak cukup bagi masyarakat supaya dapat memahami tentang manfaat dari pembangunan tersebut dan berbagai hal yang berkaitan dengan hak-hak mereka seperti ganti untung, relokasi masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Lambo. Akan tetapi juga perlu pendekatan khusus atau pendekatan budaya. Dalam pembangunan waduk Lambo ini sejak awal masyarakat di lokasi rencana pembangunan waduk ini tidak dilibatkan secara aktif oleh pemerintah daerah baik Pemerintah Daerah Ngada pada tahun 2001 yang lalu maupun pemerintah Daerah Nagekeo tahun 2015. Hal ini menimbulkan ketersinggungan masyarakat adat, sebab di lokasi ini terdapat kuburan-kuburan nenek moyang

dari suku-suku yang mendiami lokasi ini. Selain itu, juga terdapat tempat ritual adat yang dikeramatkan oleh suku-suku atau masyarakat setempat.

Untuk mendukung analisis ini, Tim Penulis menyajikan hasil wawancara Dominikus B. Insantuan selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo tanggal 18 Agustus 2020 bahwa :

Di awal perencanaan pembangunan Waduk Lambo memang pemerintah tidak melibatkan masyarakat setempat, karena pada waktu itu dari tim survei datang langsung ke tempat lokasi pembangunan tanpa ada pendekatan dengan masyarakat setempat. Dan berbagai gelombang penolakan pada periode awal perencanaan memang didasarkan atas kekecewaan masyarakat yang merasa keberadaan mereka tidak dihargai. Dan sosialisasi yang dilakukan saat itu sangat formal dan tidak mempertimbangkan kultur setempat. Bukan pemerintah sebenarnya tapi aparat pemerintah pada saat itu menempuh pendekatan yang keliru sedangkan masyarakat juga ingin keberadaan mereka diakui.

Menurut wawancara dengan Bernard Fansiena selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Nagekeo tanggal 19 Agustus 2020 sebagai berikut:

Hal yang pertama itu soal pendekatan dan sosialisasi. Mungkin itu yang menjadi dasar karena kemarin itu dengan situasi politik jadi banyak kepentingan masuk dan juga sosialisasi kepada masyarakat yang tidak sedetail mungkin sehingga ada kesalahpahaman antara masyarakat yang tolak dan masyarakat yang menerima karena masalah sosialisasi dan cara pendekatan kita yang sedikit keliru. Kita salah

mendekatkan pada orang yang salah sehingga terjadi situasi kondisi dilapangan yang kurang kondusif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi masyarakat adat terhadap pembangunan waduk Lambo karena tidak adanya pendekatan yang bersifat budaya yang dilakukan pemerintah Daerah Nagekeo terhadap masyarakat adat.

c. Hilangnya tempat tinggal sebagai basis kultural

Rencana Pembangunan Waduk Lambo akan menenggelamkan seluruh wilayah Dusun Malopama di Desa Rendubutowe. Oleh karena itu, 71 kepala keluarga akan kehilangan tempat tinggal, sehingga harus direlokasi dan 47 buah pemukiman warga akan tenggelam. Kemudian, juga akan kehilangan lahan produktif (sawah dan kebun); serta tanaman umur panjang seperti jambu mente, kemiri dan sebagainya. Demikian juga dengan sarana dan prasarana umum (gereja/kapela, SD, SLTP, Posyandu, Polindes). Perkuburan nenek moyang dari Suku Redu 10 (sepuluh) buah perkuburan, Suku Gaja 8 (delapan) buah perkuburan dan Suku Isa 5 (lima) buah perkuburan.

Menurut pandangan masyarakat Desa Rendubutowe dampak utama dari rencana pembangunan Waduk Lambo adalah akan hilangnya tempat tinggal sebagai basis kultural dan warisan leluhur membuat masyarakat menolak pembangunan waduk tersebut. Melihat dampak negatif tersebut maka masyarakat adat menawarkan 2 (dua) lokasi alternatif sebagai penggantinya kepada pemerintah yaitu *Malawaka* dan *Lowopebhu*. Akan tetapi setelah disurvei pemerintah daerah di kedua lokasi tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga

pemerintah menolak memindahkan lokasi pembangunan waduk tersebut.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Yermias Lele Selaku Bapak Kepala Desa Rendubutowe, tanggal 10 Agustus 2020 sebagai berikut:

Sebagai pemerintah artinya secara umum sebagai aparat pemerintah desa menurut saya dengan adanya pembangunan waduk ini kemungkinan terbesar masyarakat akan kehilangan tempat tinggal, basis kultural dan juga warisan leluhur jika dipindahkan ke lingkungan baru, sekarang tinggal saja bagaimana pemerintah buat pendekatan-pendekatan secara langsung dengan masyarakat agar permasalahan tidak berlarut-larut dan juga pembangunan ini terlaksana.

Demikian juga sesuai hasil wawancara dengan Bernadinus Gaso sebagai Ketua Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo tanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut:

Jika kita dipindahkan ke lingkungan baru dan berada di kawasan orang lain maka semua warisan leluhur seperti kebiasaan-kebiasaan melakukan upacara dan ritual pada tempat atau rumah adat kami akan hilang. Karena kami harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan bisa saja kami akan mempelajari adat dan budaya orang lain karena kami sudah berada di kawasan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa masyarakat adat di Desa Rendubutowe menolak pembangunan Waduk Lambo, karena akan memisahkan mereka dari tempat tinggal (rumah) yang telah mereka diami secara turun-temurun.

d. Hilangnya lahan produktif

Pembangunan Waduk Lambo membutuhkan lahan yang sangat luas 431,92 ha, sehingga otomatis banyak lahan masyarakat yang hilang atau beralih fungsi. Banyaknya lahan masyarakat yang beralih fungsi menjadi area genangan waduk Lambo tanpa ada kejelasan mengenai ganti untung lahan-lahan milik masyarakat seperti sawah, kebun yang selama ini sumber penghidupan masyarakat setempat.

Lahan-lahan ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat setempat sebagai petani. karena sawah dan kebun merupakan lahan yang digunakan para petani untuk menopang kehidupan mereka secara turun-temurun. Masyarakat Desa Rendubutowe sebagian besar adalah petani. Oleh karena itu, apabila lahan produktif mereka dijadikan area genangan waduk Lambo, otomatis akan mata pencaharian. Sementara di sisi lain, pemerintah daerah belum menjelaskan mengenai pergantian lahan-lahan produktif masyarakat yang direncanakan menjadi area genangan waduk Lambo. Demikian juga masyarakat yang kena dampak pembangunan tersebut tidak ada kejelasan di mana mereka direlokasi oleh pemerintah daerah.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Ibu Mariana Dua selaku Pemerintahan Daerah Kabuapten Nagekeo tanggal, 15 Agustus 2020) mengemukakan bahwa :

Ya kalau direlokasi di sekitar waduk belum tentu masyarakat akan beralih mata pencaharian seperti sawah dan perkebunan mereka, kehidupan sebelumnya tidak terlalu banyak berubah, tapi mungkin tempatnya saja yang baru. Tapi soal tentang lahan produktif dan lain sebagainya tentu

tidak. Dan kalau memang masyarakat mau dipindahkan ke tempat yang baru pasti pemerintah akan siapkan.

Sedangkan menurut Ketua DPRD Kab. Nagekeo Bapak Marselinus F. Ajo Bupu yang diwawancarai tanggal 15 Agustus 2020 mengemukakan bahwa :

Lahan produktif merupakan tempat dimana mereka mengolah dan mendapatkan hasil demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, jika kita memaksa mereka untuk pindah dan itu bisa membuat mereka trauma akan meninggalkan segala sesuatu yang mereka punya dan berpikir pasti akan lebih menderita kalau berada di lingkungan baru karena akan memulai hidup dari nol.

Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah Daerah Nagekeo sampai saat dimulai kegiatan pengukuran lahan yang menjadi area pembangunan Waduk Lambo belum mempunyai konsep yang jelas tentang pergantian untung lahan-lahan masyarakat, relokasi masyarakatnya, bagaimana cara memindahkan tempat-tempat ritual masyarakat adat, dan kuburan-kuburan nenek moyang masyarakat adat Lambo.

PENUTUP

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab adanya resistensi masyarakat adat dalam pembanguana Waduk Lambo yaitu :

- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat adat di Desa Rendubutowe sebagai lokasi

rencana pembangunan Waduk Lambo. Sosialisasi tentang rencana pembangunan waduk hanya dilakukan sekali saja, sehingga masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas tentang hak-haknya sebagai konsekuensi dari pembebasan lahan untuk pembangunan tersebut.

- b. Pendekatan kepada masyarakat yang kurang tepat.

Dalam rangka pembangunan waduk Lambo Pemerintah Daerah Nagekeo hampir tidak ada pendekatan secara budaya kepada masyarakat Rendubutowe, kecuali hanya berupa surat pemberitahuan untuk pengukuran lahan bagi pembangunan waduk Lambo. Karena itu masyarakat merasa tidak mendapat penghargaan terhadap eksistensi mereka sebagai orang-orang yang secara turun-menurun mendiami wilayah ini.

- c. Hilangnya tempat tinggal sebagai basis kultural

Sebagai dampak dari rencana pembangunan waduk Lambo, masyarakat adat Lambo akan kehilangan tempat tinggal (rumah), tempat-tempat ritual adat, dan kuburan-kuburan nenek moyangnya. Tempat tinggal (rumah) merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan diri mereka sendiri.

- d. Hilangnya lahan produktif.

Konsekuensi lain dari rencana pembangunan Waduk Lambo masyarakat adat Randubutowe akan kehilangan lahan produktif seperti sawah, lading, kebun dan tanaman-tanaman produktif seperti jambu mente, kelapa, yang selama ini sebagai sumber penghidupan mereka sebagai petani.

DAFTAR RUJUKAN

- Alisjahbana. 2005. *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta: Laskbang Pressindo.
- Gidion, Ofé D. 2017. *Pembebasan Tanah dan Konflik Sosial (Studi Kasus Tentang Kebijakan Pembangunan Bendungan Raknamo)*. Kupang. Universitas Nusa Cendana.
- Hamin, Ferdi dan Michael Ndoy. 2003. "Pengorbanan Orang Miskin di Hulu Untuk Kemakmuran Masyarakat Industri di Hilir" dalam Menguak Rahasia Dibalik Merabeknya Konflik-Konflik Agraria di Flores dan Timor. VeCo Indonesia dan KPA, Denpasar.
- Hidayat A. Rizal. 2007. *Gerakan Sosial Sebagai Agen Perubahan Sosial*, Jurnal Forum Ilmiah Indonesia, Vol 4 No 1.
- Hutagalung, Aries S. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Cetak 1. Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. Jakarta.
- Coleman S, James. 2011. *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Jayamartono, Mulyono. 1991. *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat Dalam Pembangunan*. Samarang: IKIP Samarang Press.
- Lexy J, Maleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Jakarta: Reflika Aditama.
- Marzali, Amri. 2005. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Pranada Media.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Nurhajariri, Dwi Ratna, dkk. 2005. *Kerusuhan Sosial di Madura Kasus Waduk Nipah dan Ladang Garam*. Yogyakarta: Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan.
- T. Notohadiprawiro. 2000. *Tanah dan Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- R. Gandakoesoemah. 1981. *Irigasi I*. Bandung: Sumur Bandung.
- Scott, James. 2000. *Senjata Orang-orang Kalah; Bentuk-bentuk Resistensi Sehari-hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Singh, Rajendra. 2001. *Social Movements, Old and New: a Post-Modernist critique*. New Delhi/Thousand Oaks/Lodon: Sage Publications.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi Edisi Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suriadi, A. 2005. *Resistensi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan*. Jurnal. Jakarta: Universitas Indonesia, FISIP, Program Pasca Sarjana, Program Studi Sosiologi.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, M. 2003. *Multimedia Alat untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Andi.

- T. Notohadiprawiro. 2000. *Tanah dan Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Usmana, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Zuraidah. 2013. "Perlawanan Perempuan Mesir Terhadap Dominasi Laki-laki Dalam Novel Laili Wadud Karya Najib Al-Kailani" (<http://etd.repositori.ugm.ac.id/index.php/Wacanan/article/viewfile/3638/2893>)

Dokumen

- Bendungan Raksasa dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat* (<http://referensi.elsam.or.id./2015/06/bendungan-raksasa-dan-perampasan-ruang-hidup-rakyat/>) diakses 5 Maret 2020.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1982. *Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia*.
- Empat Bendungan Dilelang Pada Maret 2018, Kompas, 17 Februari 2018.
- Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan Pasal 1 Ayat 2.
- Proyek Strategi Nasional Sektor Bendungan (Bendungan Mbay) <http://kppip.go.id/proyek-strategi-nasional/sektor-bendungan/bendungan-mbay/>, diakses 5 Maret 2020.
- Surat Keputusan Gubernur NTT No.186/KEP/HK/2019 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan di NTT.

Perundangan-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Skripsi/Tesis:

- Strategi Perlawanan Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Waduk Lambo Di Desa Rendubutowe Kabupaten Nagekeo. Oleh Helenerius Ajo Leda, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta. 2018.
- Studi Tentang Dinamika Perlawanan PLP-KP Dalam Merespon Relasi Korporasi Swasta Dan Negara Dalam Proyek Privatisasi "Pasir Besi Kulon Progo di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo. Oleh Sovya Mardiningrum, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2010.
- Proses dan Dinamika Gerakan Rakyat: Studi Tentang Gerakan Rakyat Sosial Masyarakat Adat Atoni Meto Dalam Menutup Pertambangan Marmer Di Desa Netpala Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. Oleh Kristinawati Titik, Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 2017.